

peradaban Nusantara diantara 7 peradaban yang akan muncul itu. Kebangkitan itu bukan pula bagian Occidentalism yang membalikkan orientalism (Said, n.d.; Wang, 1997).

Huntington berangkat dari asumsi konfliktual kelanjutan dari keterjutannya berkaitan dengan berakhirnya perang dingin. Ketika menjawab kritik tentang tesisnya, ia dengan sederhana hanya menjawab *If Not civilizations, What?* (Huntington, 1993b). Peradaban Barat Sebagian dibangun memang dari satu puing peperangan ke puing lainnya. Peradaban lahir dari kehancuran satu peradaban dan kemunculan peradaban baru. Orang mencatat perang 30 tahun dari tahun 1618 hingga 1648 yang menghasilkan perjanjian Westphalia, kemudian perang dunia I dan II. Dari puing-puing itu dibangun peradaban baru.

Pada masa modern ini, perang dilakukan mereka dengan misi untuk memperadabkan negara lain atau terkenal dengan istilah *civilizing mission* (Watt & Mann, 2011). Ada perasaan superioritas dan sah (legitimate) ketika mereka menyerbu negara lain. Atas nama demokrasi, Iraq, Libya, Afghanistan dan Iraq diserbu dan dihancurkan. Tidak ada satu pun yang berhasil dari perang yang dianggap *civilizing mission* itu atau untuk menegakkan demokrasi. Iraq menderita berkepanjangan. AS terpaksa angkat kaki dari Afghanistan meninggalkan negeri itu, dan negeri itu menjadi antithesis terhadap peradaban Barat. Media berperan sangat besar dalam memframing semua Langkah Barat ini yang telah berhasil membentuk opini dunia agar berfihak pada mereka yang melakukan penyerbuan ini.

Hari-hari ini orang menyaksikan dengan kasat mata bagaimana peradaban modern Barat itu ditegakkan. Hampir semua negara Barat, AS, Uni Eropa dan Inggris mendukung pembantaian Israel terhadap warga Palestina terutama warga sipil, ibu-ibu dan anak-anak. Kalau lah orang-orang Palestina melawan, itu karena mereka seringkali tidak mempunyai cara lain agar aspirasi hidup mereka untuk Merdeka didengar, di Tengah dunia yang semakin mengabaikan dan melupakan mereka. Teori dominan dalam hazanah pengetahuan Barat adalah memang mengatakan bahwa perdamaian hanya tercipta kalau musuh kalah dan hancur.

Aspek kemanusiaan dan etik tidak ada dalam kalkulasi realis seperti ini. Moralitas dan etika ditentukan oleh kesepakatan manusia yang rasional untuk memutuskan apa yang baik dan buruk buat mereka. Etika konsekwensialis menjadi sangat dominan, dimana etika didasarkan pada konsekwensi yang didapat. Ia tidak didasarkan pada asumsi dasar tentang etik kebenaran bahwa kebenaran itu harus diterapkan apa adanya. Barangkali etik esensialis tidak punya satu pegangan yang kuat. Padahal para rohaniawan sejak lama mengatakan, mereka perlu kitab suci.

Ke Arah Teori Hubungan Internasional Non-Barat

Sebuah teori sosial lahir dari pengalaman yang berulang dan pengalaman itu dalam banyak kasus bisa diseleksi untuk akhirnya semakin memperkuat teori itu. Peristiwa-peristiwa Sejarah besar biasanya menjadi momentum untuk melahirkan sebuah teori baru atau untuk memperbaharui atau memperkuat teori yang ada. Tujuannya adalah mencoba menjelaskan mengapa peristiwa itu terjadi dan kesalahan pemahaman seperti apa selama ini yang terjadi. Salah satu contohnya adalah teori realisme dalam studi Hubungan Internasional yang bukan hanya digunakan untuk menjelaskan tetapi juga menjadi preskripsi bagi pengaturan tatanan dunia lahir dari proses seleksi pengalaman kehidupan Barat yang demikian. Ia mewakili satu aspek dari human nature manusia tentang ambisi kekuasaan untuk mengontrol dan menguasai. Ia lahir dari pecahnya perang dunia ke II yang diasumsikan karena orang terlalu percaya bahwa manusia bisa rasional pada hubungan yang harmonis antar negara.

Ada dua masalah mendasar di sini. Pertama apakah kekuasaan itu human nature atau sifat yang inheren dalam diri manusia, dapat diperdebatkan karena factor-faktor lain biasanya lebih berperan terhadap lahirnya kekerasan dan permusuhan. Kedua, dalam kasus-kasus tertentu secara empiric mungkin teori itu benar untuk menjelaskan suatu peristiwa pada satu saat tetapi preskripsi sebagai konsekuensi logis dari teori itu sangat berbahaya. Lalu muncul lah istilah seperti kalau mau damai maka bersiaplah untuk berperang, musuh dari musuhku ada temanku dan berbagai istilah lainnya.

Teori sosial seperti realisme hanya benar pada satu konteks dan pada waktu tertentu. Di luar itu, teori itu seringkali dipaksakan untuk berlaku. Sebuah teori seharusnya sadar akan konteks kelahirannya dan mampu melakukan refleksi untuk melakukan transformasi hubungan internasional ke arah yang lebih damai. Dengan kata lain teori itu, tidak mesti mengambil preskripsi dari konsekuensi logis teori tersebut. Namun ia mestinya melakukan preskripsi transformatif ke arah kehidupan yang lebih damai itu sayangnya tidak terjadi sampai sekarang.

Peradaban manusia seharusnya mampu bergerak ke arah penciptaan lembaga-lembaga yang dapat mencegah dan mengatasi perang, ketakutan dan kelaparan. Beberapa lembaga itu ada, seperti misalnya PBB namun ia tidak berdaya misalnya melawan penindasan bahkan penghapusan sebuah bangsa Palestina yang kini dilakukan Israel. Uni Eropa yang merupakan Kumpulan negara-negara dengan prinsip utama keanggotaannya berdasarkan demokrasi dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia bukan saja mengamini serangan Israel tetapi bersikap berada penuh di belakang aksi Israel tersebut.

Kontribusi Peradaban Nusantara pada Studi HI

Salah satu Sejarah Hubungan Internasional Nusantara bisa dilihat hikayat Raja-raja Melayu, Babad Tanah Jawa dan berbagai tulisan kuno lain. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu sebuah system hubungan internasional yang ideal. Yang ingin saya katakan adalah itu salah satu pengalaman hubungan antar bangsa yang unik. Kalau di Barat, ada pengalaman hubungan sering dirujuk jauh sebelum masa Kerajaan Melayu itu dalam Peloposinian War yang sering dikatakan sebagai fondasi bagi lahirnya teori-teori realisme yang dominan sampai sekarang, maka di Asia Tenggara, Nusantara punya pengalaman hubungan yang berbeda yang relative damai dan konstruktif. Mungkin dalam peradaban Barat seperti dikatakan Toynbee tentu saja ada aspek peradaban damai demikian, namun aspek demikian tersingkirkan dalam kanvas pertarungan paradigma keilmuan HI di sana.

Lalu mengapa pengalaman Barat yang menjadi teori sedangkan pengalaman Asia seperti pada Kerajaan-kerajaan Melayu atau pun Kerajaan-kerajaan Hindu sebelumnya tidak menjadi teori dalam hubungan internasional? Jawabannya berasal dari proses Sejarah yang sangat Panjang dan mendasar dimana definisi tentang modernitas, kemajuan, rasionalitas dikuasi oleh para ilmuwan dan universitas-universitas Barat. Barat seiring dengan kolonialisme bahkan berhasil mendefinisikan bahwa peradaban yang maju dan beradab itu adalah peradaban Barat. Proses ini bahkan membuat mereka bangga, merasa superior dan ingin memperadabkan dunia. Ini tercermin dari istilah White Men Burden, perasaan tanggung jawab Orang Barat untuk melakukan perluasan peradaban sebagai standar peradaban dunia. Itu ditunjukkan dalam buku-buku tentang Masyarakat internasional dan expansion of international society yang mengatakan bahwa peradaban-peradaban di luar Eropa harus menyesuaikan dengan standar peradaban barat, kalau mereka tidak mau dianggap sebagai negara pariah.

Berdasarkan realitas ini para intelektual perlu terus menggali dan menunjukkan bahwa Nusantara punya pengalaman Sejarah dan peradaban sendiri jauh sebelum penjajahan datang dan merusak tatanan peradaban dan budaya Nusantara yang ada itu. Penjajahan dan imperialisme bukan saja telah melakukan eksploitasi ekonomi tetapi telah menghapus peradaban itu dari peta keilmuan, menganggapnya tidak penting dan tidak perlu. Para ilmuwan Timur pun harus berfikir berdasarkan teori Barat untuk maju dan diakui.

3. Kesimpulan

Akhirnya sebagai kesimpulan ada tiga hal yang ingin saya katakan. Pertama, penggalian peradaban Nusantara itu bermakna juga untuk mengatakan bahwa negeri-negeri di sini sudah eksis dan ada sejak lama. Indonesia misalnya ada bukan warisan penjajahan Belanda. Penjajahan justru memporak-porandakan eksistensi dan hubungan-hubungan antar Kerajaan yang harmonis dan beradab pada saat itu. Di Tengah dunia yang tidak menentu dan perebutan pengaruh yang semakin menegangkan di Indo-Pasifik antara Cina melawan AS dan sekutunya, kesadaran historis tentang eksistensi Indonesia sebagai negara yang sudah lama eksis menjadi sangat penting.

Pengalaman Nusantara sama halnya dengan pengalaman peradaban-peradaban Asia lainnya yang disingkirkan dalam khazanah akademik Barat. Padahal peradaban Islam, Cina dan India misalnya sebelum datangnya bangsa Eropa sudah ada sejak lama. Kebangkitan peradaban-peradaban ini Sebagian dinarasikan Kembali pada masa kini untuk menggambarkan bahwa masa lalu itu bisa dibawa ke masa sekarang.

Kedua, narasi kebangkitan peradaban non-Barat apakah itu peradaban Islam, Cina, India dan Nusantara mengingatkan bahwa peradaban dunia pernah terbentuk dalam suatu hubungan yang harmonis, solidaritas dan kerjasama yang saling menguntungkan. Hubungan-hubungan itu dilandasi pada fondasi tujuan dan nilai religius yang tidak berdasarkan pada kepentingan kerakusan kekuasaan. Bahwa peradaban itu tidak dominan sekarang, itu adalah karena dominasi intelektual dan keilmuan Barat

yang secara sepihak, rasis dan diskriminatif berhasil mendefinisikan peradaban Barat sebagai acuan peradaban dunia.

Jalur sutera yang diangkat Cina sebagai landasan BRI misalnya mengasumsikan kerinduan akan masa lampau itu akan terjadi bila BRI di dukung. Tentu saja ini proyek hegemoni Cina namun mereka dengan pandai mengangkat Sejarah bukan hanya untuk menegaskan identitas Cina dengan Kebangkitan Damainya melalui jalan sutera, tetapi mengajak negara-negara lain untuk bergabung menglorifikasi masa lampau itu dalam sebuah Pembangunan dan Kerjasama ekonomi ke depan.

Ketiga, dalam contoh yang lebih konkrit pengalaman Sejarah tentang peradaban Nusantara apakah itu dari Kerajaan Melayu, Jalur Maritim Jalur Rempah ataupun jalur Nusantara berdasarkan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya mengkritisi teori Nation-State Barat dari satu aspek penting. Dalam teori ini yang banyak penganutnya sampai sekarang diasumsikan bahwa Satu Nation atau Bangsa mestinya Satu Negara. Itu adalah hasil dari perjanjian Westphalia yang memecah-mecah bangsa Eropa berdasarkan suku-suku seperti Bangsa Rusia untuk negara Rusia, bangsa Slav untuk Slavia, Bangsa Belarus untuk Belarusia, Kazakh untuk Kazakhtan dan Bangsa Yahudi untuk negara Yahudi seterusnya sampai sekarang. Berdasarkan teori itu, seorang ilmuwan Barat bernama Colin Brown sampai pada kesimpulan bahwa dengan realitas keragaman suku itu, Indonesia itu adalah Unlikely State karena Nusantara berbagai suku bangsa tapi satu Indonesia (Brown, 2003). Masih ada kemungkinan bahwa pada tahun-tahun awal abad ini Indonesia akan lenyap sebagai sebuah entitas politik dan sosial, atau hanya akan terus ada dalam bentuk yang sangat terpenggal (Brown, 2003).

Ramalan Brown tidak terlalu tepat kiranya. Karena Indonesia memasuki abad ke-21 ini tetap bertahan. Teori one nation-one state itu tidak tepat karena pengalaman di Asia menunjukkan bahwa berbagai bangsa bisa Bersatu dalam satu negara. Negara-negara Asia terutama Indonesia sejak lama hidup berdasarkan berbagai suku bangsa dan semua melebur menjadi Indonesia dalam konsep Bineka Tunggal Ika. Justifikasi segelintir ilmuwan Barat untuk mendukung pemisahan wilayah Indonesia karena berbeda suku dengan demikian gugur bila dibenturkan dengan konsep Bineka Tunggal Ika. Indonesia memang sudah beragam dari awal dan berusaha untuk hidup harmonis dari keragaman itu.

Namun di Barat, keragaman negara mereka itu datang kemudian dengan kehadiran para imigran asing ke negara mereka. Hal itu telah mengejutkan mereka dan mengganggu sendi-sendi homogenitas yang dulu menjadikan mereka hidup sangat nyaman. Keragaman itu menimbulkan berbagai kegagapan di negara-negara Eropa bahkan di Amerika yang dianggap multikultur. Masyarakat Dunia kemudian menyaksikan lahirnya tokoh-tokoh Populisme yang sangat rasis seperti Donald Trump dan banyak pemimpin sayap kanan populis di Eropa yang diskriminatif terhadap imigran.

Melihat pengalaman ini, saya juga ingin mengatakan proses Pembangunan Bangsa bukan berarti sudah selesai. Sebagian anggota masyarakat memang menikmati kemerdekaan dan persatuan. Tapi harus diingat ini adalah proses dan proses yang berlanjut dan harus dijaga. Khususnya masyarakat Indonesia harus membuktikan bahwa pandangan Ilmuwan Barat tadi tentang Indonesia sebagai Unlikely State adalah keliru dan misleading. Indonesia sebagai sebuah Negara bukan hanya Sangat Mungkin (very likely) tetapi memang eksis sejak sediakala.

Referensi:

- [1] Acharya, A. (2018). *Constructing Global Order*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316756768>
- [2] Angelou, M., Kendall, D. M., Luers, W. H., Schmidt, B. C., & Wolfensohn, J. D. (1991). *Shaping the New World Order: International Cultural Opportunities and the Private Sector*. Edited Proceedings of an International Cultural Forum (Washington, D.C., December 13, 1991). Institute of International Education, 809 United Nations Plaza, New York, NY 10017.
- [3] Brown, C. (2003). *A short history of Indonesia: the unlikely nation?* Allen & Unwin. https://books.google.com/books/about/A_Short_History_of_Indonesia.html?hl=id&id=uGrIdxXzupYC
- [4] Chong, A. (2018). Ethical political economy: Lessons from the Malay world's Hikayat Abdullah (1849). *Asian Journal of Comparative Politics*, 3(3), 219–231. <https://doi.org/10.1177/2057891117749948>

- [5] Chong, A. (2020). Mercantile harmony: The ancient silk roads as intercultural meeting points amongst monks, pilgrims and merchants. *Critical Reflections on China's Belt & Road Initiative*, 41–65. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2098-9_3/COVER
- [6] Chong, A. (2022). The Cosmopolitan Silk Road Worldview: Developing an Interfaith Ethic of Hospitality in Ancient Buddhist and Christian Writings. *Global Studies Quarterly*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/ISAGSQ/KSAC007>
- [7] CLARK, I. A. N. (2011). China and the United States: a succession of hegemonies? *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944-), 87(1), 13–28. <http://www.jstor.org/stable/20869608>
- [8] Huntington, S. P. (1993a). The Clash of Civilizations? *Foreign Affairs*, 72(3), 22. <https://doi.org/10.2307/20045621>
- [9] Huntington, S. P. (1993b, December 1). If Not Civilizations, What? Samuel Huntington Responds to His Critics | *Foreign Affairs*. *Foreign Affairs*. <https://www.foreignaffairs.com/articles/commons/1993-12-01/if-not-civilizations-what-samuel-huntington-responds-his-critics>
- [10] Jones, L. (2020). Does China's Belt and Road Initiative Challenge the Liberal, Rules-Based Order? *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 13(1), 113–133. <https://doi.org/10.1007/S40647-019-00252-8>
- [11] Said, E. (n.d.). *Orientalism* (p. 12).
- [12] Wang, N. (1997). Orientalism versus Occidentalism? *New Literary History*, 28(1), 57–67. <https://doi.org/10.1353/NLH.1997.0013>
- [13] Watt, C. A., & Mann, M. (2011). *Civilizing missions in colonial and postcolonial South Asia : from improvement to development*. Anthem Press.